

RISALAH RAPAT

- Hari/Tanggal** : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : 15.30 – 17.00 WIB
Tempat : KPPIP
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Rapat Terbatas (RATAS) Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Peserta** : Sekretariat Kabinet;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Kementerian Keuangan;
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
Kementerian BUMN;
Kementerian PUPR (Ditjen. Sumber Daya Air);
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR);
Kementerian Hukum dan HAM;
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR;
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah;
PT Pelabuhan Indonesia III.
- Tidak Hadir** : Sekretaris Daerah Provinsi NTB;
Kementerian Perhubungan (Ditjen. Perhubungan Laut);
Kementerian PUPR (Ditjen. Bina Marga).
- Agenda Rapat** : Pembahasan tindak lanjut RATAS PSN di Provinsi NTB
- Pembahasan** :

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Permasalahan diperlukan penjelasan kepada masyarakat tentang pemberian uang kerohiman dan diperlukan Perpres yang mengatur tentang penyelesaian uang kerohiman terhadap tanah negara

Kemenko Bidang Perekonomian:

- Pembahasan terkait uang kerohiman telah dirapatkan dan Perpres sedang dalam proses pengundangan.

Kementerian BUMN:

- Uang kerohiman senilai Rp42 milyar telah direalisasikan secara keseluruhan dan tidak ada lagi masyarakat yang meminta uang kerohiman. Namun hal ini akan dicek kembali statusnya, terutama karena realisasi uang kerohiman dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden terkait diterbitkan.

Permasalahan Diperlukan penyelesaian terhadap isu pelebaran jalan KEK Mandalika

- Perwakilan yang berwenang atas permasalahan ini tidak hadir.

Bendungan Meninting

Diperlukan kepastian masuknya Bendungan Meninting dalam daftar proyek yang akan dikerjakan pemerintah tahun 2018

Kementerian PUPR:

- Kegiatan pembangunan bendungan masuk dalam Rencana Kegiatan Tahun 2018 namun rencana aksi rinci belum tersedia.
- Selanjutnya, kegiatan juga telah masuk dalam Rencana Kerja Kementerian PUPR.

Kemenko Bidang Perekonomian:

Cek dampak pengurangan DIPA Kementerian PUPR terhadap rencana proyek.

Bendungan Bintang Bano

KPPIP:

- Cek status terakhir dengan Ditjen. Sumber Daya Air karena laporan kemajuan konstruksi (22,8%) berbeda dengan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR (21%).

Bendungan Mila

Kementerian PUPR:

- Per 25 Mei 2017, status kemajuan konstruksi mencapai 61%.
- Untuk menanggulangi isu kebutuhan penambahan luas wilayah *disposal*, saat ini tengah disusun Nota Kesepahaman (MoU) oleh Balai Besar Wilayah Sungai NTB 1 dengan Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) untuk total wilayah 19,7 ha. Kemajuan penyusunan MoU akan disampaikan lebih lanjut oleh Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. MoU ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Laporan status penyusunan MoU akan disampaikan oleh Ditjen. Sumber Daya Air, Kementerian PUPR sebelum tanggal 23 Juni kepada Keasdepan Sumber Daya Air, Kemenko Bidang Perekonomian.

Bendungan Tanju

KPPIP:

- Laporan kemajuan pembangunan antara Bendungan Mila dan Tanju perlu dipisah agar dapat dimonitor kemajuan konstruksi fisik secara bersamaan karena kedua bendungan tersebut saling terkait.
- Sudah diajukan anggaran untuk penambahan luas lahan dari anggaran BLU LMAN, Kementerian Keuangan.

Tindak Lanjut :

No.	Proyek	Tindak Lanjut	Pelaksana	Target Pelaksanaan
1	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, NTB	Memberikan penjelasan kepada masyarakat/pers tentang pemberian uang kerohiman dalam proyek KEK Mandalika.	Kemenko Perekonomian dan/atau Kemenko Kemaritiman	April 2017
		Melanjutkan proses pengundangan Perpres yang mengatur tentang uang kerohiman terhadap tanah negara. Tanggapan: Perpres 56/2017 tinggal menunggu tanda tangan Menteri Hukum dan HAM.	Kementerian Hukum dan HAM	Minggu ke-3 Juni 2017
		Melakukan koordinasi percepatan pelebaran jalan nasional (BIL-Kuta), dan proses koordinasi/pengkajian pembuatan jalan <i>bypass</i> baru. Perwakilan Ditjen. Bina Marga, Kementerian PUPR tidak hadir. Tindak lanjut: Rapat pembahasan dengan Kementerian PUPR.	Kemenko Perekonomian	<i>untuk didiskusikan</i>
2	Bendungan Meninting	Memasukkan proyek Bendungan Meninting dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Tindak lanjut: Rapat pembahasan dengan Kementerian PUPR.	Kementerian PPN/Bappenas	<i>untuk didiskusikan</i>